

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN**

**DENGAN PEMBERATAN**

**(Studi Kasus Putusan NO.94/Pid.B/2015/PN Mrs)**



**Oleh :**

**RAYHANAH FIRABI AS**

**B111 12 303**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2016**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN**

**DENGAN PEMBERATAN**

**(Studi Kasus Putusan NO.94/Pid.B/2015/PN Mrs)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Pada Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum

**Oleh**

**RAYHANAH FIRABI AS.**

**B 111 12 303**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2016**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN PEMBERATAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 94/PID. B/2015/PN. MAROS)

**Disusun dan diajukan oleh**

**RAYHANAH FIRABI AS**

**B11112303**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Rabu 17 Februari 2016  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**



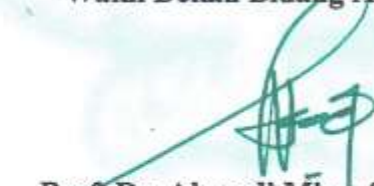
**Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.**  
NIP. 195701011896011001

**Sekretaris**



**Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP. 196710101992022002

**A.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik**



**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**  
Nip.19610607 198601 1003

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : RAYHANAH FIRABI AS.

Nomor Pokok : B111 12 303

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA

PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Kasus Putusan

NO.94/Pid.B/2015/PN Mrs)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas  
Hukum Universitas Hasanuddin :

Pembimbing I

Makassar Januari 2016

Pembimbing II

Oleh

Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.Si.  
NIP. 19590317 198703 1 002

Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 19671010 1992022 002

Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.Si.  
NIP. 19590317 198703 1 002

Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 19671010 1992022 002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

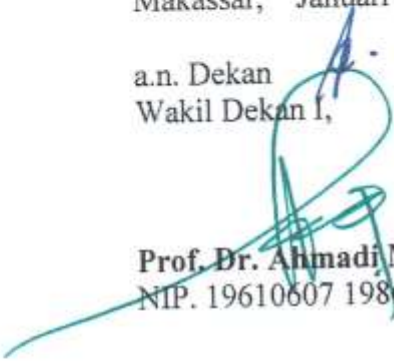
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **RAYHANAH FIRABI AS.**  
No. Pokok : B111 12 303  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian  
Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan  
No.94/Pid.B/2015/PN.Mrs)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2016

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H.**  
NIP. 19610607 198601 1 003

## ABSTRAK

**RAYHANAH FIRABI AS** (B111 12 303), **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** (Studi Kasus Putusan Nomor 94/Pid.B/2015/PN Mrs), dibimbing oleh Bapak **Muhadar** sebagai Pembimbing I dan Ibu **Nur Azisa** sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan No. 94/Pid.B/2015/PN Mrs dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana No. 94/Pid.B.2015/PN Mrs.

Penelitian ini dilaksanakan dalam Wilayah Kabupaten Maros Sulawesi Selatan yaitu pada Pengadilan Negeri Maros. Penulis memperoleh data dengan menganalisis kasus putusan dan mengambil data dari kepustakaan relevan yaitu literatur, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut, serta mengambil data secara langsung dari sebuah putusan pengadilan yang berupa wawancara kepada hakim yang terkait dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Dari penelitian yang dilakukan penulis diperoleh kesimpulan bahwa (1) Berdasarkan putusan perkara No. 94/Pid.B/2015/PN Mrs menyatakan bahwa terdakwa Abd. Wahid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 KUH Pidana dan telah sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi maupun keterangan terdakwa. (2) Putusan hakim dalam perkara No. 94/Pid.B/2015/PN Mrs berdasarkan pertimbangan yuridis, fakta persidangan maupun alat bukti yang mendukung dalam persidangan tersebut, namun sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana Abd. Wahid, dirasa masih sangat ringan, meskipun dengan adanya alasan yang meringankan pidananya karena sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terpidana Abd.Wahid tidak cukup untuk menimbulkan efek jera yang memberikan rasa takut bagi terpidana pada khususnya dan bagi khalayak ramai pada umumnya, sebagaimana fungsi pidana yang semestinya.

## KATA PENGANTAR

*AssalamualaikumWr. Wb*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Sekalipun, penulis menyadari bahwa di dalamnya masih banyak kekurangan, karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan berbagai masukan atau saran dari para penguji untuk penyempurnaannya. Serta salam dan Shalawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya yang suci.

Dalam masa studi sampai dengan hari ini dimana Penulis sudah sampai pada tahapan akhir penyelesaian studi, begitu banyak halangan dan rintangan yang telah Penulis lalui. Banyak cerita yang penulis alami, salah satunya terkadang jenuh dengan rutinitas kampus, namun berkat sebuah cita-cita dan dengan harapan yang orang tua dan keluarga titipkan kepada penulis, akhirnya penulis dapat melalui semua itu dan tiba di hari ini dengan impian bahwa akan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di belakang nama penulis.

Dibalik perjuangan penulis berkuliah, sampai dengan akan mendapatkan gelar di belakang nama penulis, tidak pernah luput dari doa yang dipanjatkan kedua orangtua penulis. Walau tidak sempat ayahanda

melihat penulis meraih gelar sarjana dikarenakan beberapa bulan yang lalu telah berpulang ke Rahmatullah, izinkan penulis haturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada ayahanda tercinta Alm. H. Asnawir yang sangat penulis rindukan kehadirannya saat ini, penulis berharap ayahanda bisa tersenyum atas yang penulis dapatkan hari ini dan penulis senantiasa berdoa agar ayahanda mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya, Aamiin. Terimakasih pula untuk Ibunda tercinta Hj. Zohrah Hamid Aly yang tidak pernah mengeluarkan kata lelahmembanting tulang sebagai seorang ibu tanpa ayah disisi, serta selalu mendukung penulis agar dapat melanjutkan studi. Apapun yang penulis dapatkan hari ini belum mampu membalas jasa-jasa mereka. Penulis sadar bahwa hari ini adalah awal pembuktian penulis akan membalas jasa-jasa orangtua dan mempersembahkan yang terbaik untuk beliau. Sekali lagi terimakasih banyak atas cinta dan kasih sayang yang diberikan.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Kakak-kakak penulis yakni Muhammad Ilham dan Gita Amalia Firmana. Mereka adalah kakak-kakak yang sangat menyayangi penulis, dengan sangat gigih mendukung penulis baikformil maupun materi dalam rangka meraih gelar sarjana. Semoga Allah SWT membalas jasa kebaikan kakak-kakak, Aamiin.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui berkat



banyaknya pihak yang membantu, oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, beserta staf dan jajarannya.  
.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si. selaku Pembimbing I yang telah mengarahkan penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang memberikan saran, bimbingan serta motivasi untuk menulis sebaik mungkin, sehingga skripsi ini bisa menjadi lebih baik.
5. Bapak Prof. Said Karim, S.H., M.H., Ibu Dr. Hj. Haeranah, S.H., M.H dan Ibu Dr. Hj. Wiwie Heryani, S.H., M.H., selaku Penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan selama penyusunan skripsi penulis.
6. Ibu Dr. Harustiati A. Moein, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis yang selalu membantu dalam program rencana studi.
7. Seluruh dosen, seluruh staf Bagian Hukum Pidana serta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasihat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.

8. Seluruh staf Pengadilan Negeri Maros yang membantu penulis dalam masa penelitian.
9. Kepada Kakak Yayuk dan Kakak Rian Dwi Saputra, yang telah sangat berperan dalam kehidupan penulis, terima kasih untuk selalu ada memberikan semangat.
10. Kepada teman-teman tercinta Coetus, sepenanggungan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, antara lain Putri Nirina, Irsalina Julia, Yusrina Amalia, Azhima MJ. Maricar, Sadly Bakry, Sheila Masyita, Reski Paramita dan A. Dwi Maharti. Terima kasih atas waktu yang telah dilewati bersama, baik suka maupun duka, semoga sukses untuk kita semua. Tetap solid dan semangat meraih gelar Sarjana Hukum. Salam sayang.
11. Kepada teman-teman Rikuantik, teman-teman arisan hukum yang selalu penuh keceriaan, terimakasih, semoga kebersamaan kita tidak akan pernah terputus.
12. Teman-teman KKN Gel. 90 Kab.Bantaeng Kec. Bissappu Kel. Bontosunggu, yakni Yunita Ayu, Putri Nirina, A. Sarah Amirah, Apriliani Kusuma, Achmad Affandi, Edwin Fauzy, Fachry Fathrurahman dan Alvian, terimakasih kebersamaan yang diberikan, semoga sukses untuk kita semua.

13. Teman-teman Petitum 2012 Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin dan teman-teman Garda Tipikor.

Penulis sadari bahwa dalam skripsi ini masih begitu banyak kekurangan, olehnya itu dengan senang hati penulis harapkan kritik dan saran yang membangun dari para penguji dan para pembaca yang sempat membaca skripsi ini.

*Wassalamualaikum Wr Wb.*

Makassar, Januari 2016

**Rayhanah Firabi AS.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Tindak Pidana .....	9
1. Pengertian Tindak Pidana.....	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	13
B. Pidana dan Pemidanaan .....	19

1. Pengertian Pidana.....	19
2. Teori Tujuan Pidana.....	20
3. Jenis-Jenis Pidana .....	21
C. Tindak Pidana Pencurian .....	24
1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	24
2. Tindak Pidana Pencurian Berat .....	26
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	31
1. Pertimbangan Yuridis.....	31
2. Pertimbangan Sosiologis .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Lokasi Penelitian .....	35
B. Jenis dan Sumber Data .....	35
C. Teknik Pengumpulan Data .....	36
D. Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Perkara No.94/Pid.B/2015/PN Mrs.....	37
1. Posisi Kasus .....	38
2. Dakwaan Penuntut Umum .....	39
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	41

4. Amar Putusan .....	42
5. Analisis Penulis.....	43
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Perkara No.94/Pid.B/2015/PN	
Mrs .....	49
1. Pertimbangan Hakim .....	50
2. Putusan Hakim .....	57
3. Analisis Penulis.....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan, adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu, di masyarakat akan dijumpai berbagai macam pedoman, patokan atau ukuran yang masing-masing memberikan kontribusinya dalam menciptakan ketertiban. Pedoman, patokan, atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama disebut norma atau kaidah sosial. Diantaranya adalah norma hukum.

Norma hukum dibuat oleh Negara dan berlakunya dipertahankan dengan paksaan oleh alat-alat Negara seperti, polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya. Ciri khas dari norma ini memaksa yang berasal dari luar, yakni pemerintah lewat aparatnya.<sup>1</sup>

Norma atau kaidah sosial ini merupakan perumusan pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogianya dilakukan atau seyogianya

---

<sup>1</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan praktis Bila anda menghadapi perkara pidana*, (Surabaya, 2013) hal.4

tidak dilakukan, yang dianjurkan atau diperintahkan dan yang dilarang atau dibenci.

Norma hukum berisi kenyataan normatif atau apa yang seyogianya dilakukan (*das Sollen*) dan bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkret (*das Sein*). Kata “Barang siapa membunuh harus dihukum”, “Barang siapa membeli sesuatu harus membayar” merupakan *das Sollen*, suatu kenyataan normatif dan bukan menyatakan sesuatu yang terjadi secara nyata. Apabila nyata-nyata seseorang telah membunuh atau membeli sesuatu tidak membayar, barulah terjadi peristiwa konkret (*das Sein*). Jadi, norma hukum dapat berfungsi apabila ada peristiwa konkret (*das Sein*). Sebaliknya, peristiwa konkret untuk menjadi peristiwa hukum memerlukan norma hukum (*das Sollen*).<sup>2</sup>

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diancam pada larangan perbuatan yang dilanggarnya. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa

---

<sup>2</sup> Ibid, hal.7



sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha Negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan Negara dalam upaya Negara menegakkan hukum pidana.

Faktor yang dapat mempengaruhi perilaku hukum, pertama-tama komunikasi hukum (*community of law*) dan pengetahuan hukum (*knowledge of law*), yang mana keduanya sangatlah penting. Aneh bahwa dikatakan menaati atau tidak menaati aturan, menggunakan aturan, atau menghindari aturan, tanpa diketahui sebelumnya tentang aturan yang sebenarnya. Dengan kata lain, aturan harus dikomunikasikan kepada masyarakat dan masyarakat harus memperoleh pengetahuan tentang isi aturan itu.<sup>3</sup>

Obyektivitas penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakim-hakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintahan yang tidak konsisten, pengacara yang mengerjai rakyat, adalah akumulasi ketidakpercayaan lembaga yudikatif, di dalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom rakyat, yang berdampak pada tatanan

---

<sup>3</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence)*, (Jakarta, 2012) hal.163

kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan di dalam interaksi sesama warga masyarakat.

Seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum ini menjadi harapan masyarakat agar kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu pun bertambah. Berbagai kasus merebak sejalandengan tuntutan akan perubahan, tampak diberbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum.

Adapula kebutuhan akan biaya hidup di jaman sekarang ini semakin meningkat seiring dengan meningkatnya juga harga-harga kebutuhan hidup di pasaran. Tidak banyak masyarakat yang menghalalkan segala cara agar dapat memperoleh uang banyak dengan cepat, baik hal tersebut adalah tindakan melawan hukum dan dapat membuat celaka. Pencurian adalah salah satu cara yang digunakan kebanyakan orang agar dapat mendapatkan uang dengan menjual hasil jarahan.

Pencurian dibentuk dari tingkat klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia,

kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum.

Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP di dunia. Delik pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP memiliki inti delik yang menjadi definisi semua jenis delik pencurian adalah :

1. Mengambil suatu barang,
2. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara,
4. Melawan hukum.<sup>4</sup>

Semua bagian inti delik yang tercantum di dalam Pasal 362 KUHP juga berlaku untuk Pasal 363 KUHP, ditambah dengan satu bagian inti lagi yang menjadi dasar pemberatan pidana. Jika pada Pasal 362 ancaman pidananya maksimum lima tahun penjara, maka pada Pasal 363 KUHP menjadi maksimum tujuh tahun penjara.

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum yakni jaksa dan hakim memberikan sanksi yang setimpal bagi para pelaku pencurian, apalagi jika dalam melaksanakan tindak pidana pencurian tersebut pelaku merusak terlebih dahulu dan melakukannya di malam hari. Diharapkan sanksi

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP* (Jakarta, 2009) hal.100

tersebut dapat dijadikan efek jera bagi pelaku dan dapat mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut.

Dari uraian diatas akan timbul pertanyaan, bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pencurian serta bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan, yang lebih lanjut penulis akan bahas dalam judul ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan No.94/Pid.B/2015/PN Mrs)”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan salah satu bagian penting di dalam sebuah penelitian, sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang diterapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dalam Putusan No. 94/Pid. B/2015/PN Mrs ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pidana No. 94/Pid. B/2015/PN Mrs ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dalam putusan No. 94/Pid. B/2015/PN Mrs.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pidana No. 94/Pid. B/2015/PN Mrs.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi instansi penegak hukum khususnya hakim yang memutus suatu perkara pencurian dengan pemberatan dalam persidangan.
2. Sebagai sarana informasi bagi pembaca khususnya bagi kalangan mahasiswa Fakultas Hukum yang berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Arti dari kata *Straf* adalah pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan cepat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>5</sup>

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro.
- b. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya E. Utrecht.

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta, 2010) hal.69

- c. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau.<sup>6</sup>

Istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Pengertian sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/disyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP). Sementara itu perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajibannya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP). Sementara itu, istilah delik secara *literlijk* sebetulnya tidak ada kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* karena istilah ini berasal dari kata *delictum* (Latin), yang juga dipergunakan dalam perbendaharaan hukum Belanda, namun isi pengertiannya tidak ada perbedaan prinsip dengan istilah *strafbaar feit*. Sedangkan istilah perbuatan secara *literlijk* adalah lebih tepat sebagai terjemahan *feit*, yang telah lama dikenal untuk rumusan perbuatan dalam tindak pidana formil. Demikian juga istilah *feit* dalam banyak rumusan norma-norma tertentu

---

<sup>6</sup>*Ibid.* hal 67-68



dalam WvS (Belanda), selalu diterjemahkan oleh para ahli hukum dengan perbuatan dan tindak atau peristiwa maupun pelanggaran.<sup>7</sup>

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Secara umum tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan tercela yang dapat membuat pelakunya dipidana. Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut.

Unsur subjektif yaitu segala sesuatu yang berasal dan melekat pada diri pelaku termasuk segala sesuatunya yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif tindak pidana :

---

<sup>7</sup>*Ibid.* hal.70

- a. Kesengajaan atau kelalaian (*dolus atau culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat pada delik pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam Pasal 340 mengenai pembunuhan berencana.
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif adalah unsur yang berada diluar fisik dari pelaku.

Unsur-unsur objektif dari tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku misalnya pelaku adalah seorang pegawai negeri dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai suatu penyebab dengan akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

- a. **Menurut sistem KUHP**, dibedakan antara kejahatan (*misdriften*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya di dalam masyarakat terdapat perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya memang sudah tercela dan pantas untuk dipidana, bahkan sebelum dinyatakan demikian oleh Undang-Undang, dan ada juga perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah Undang-Undang menyatakan demikian.<sup>8</sup> Apa pun alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan.
- b. **Menurut cara merumuskannya**, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta, 2010) hal.123

akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata karena perbuatannya. Misalnya pada pencurian (362) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tindak pidana materiil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah terjadi dalam hal pembunuhan, namun tidak sampai menghilangkan nyawa korban maka yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.<sup>9</sup>

- c. **Berdasarkan bentuk kesalahannya**, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (kealpaan). Terdapat secara tegas

---

<sup>9</sup>*Ibid.* hal.125-126

unsur kesengajaan dicantumkan seperti pasal 362 (maksud), ada juga yang dalam rumusan tindak pidana kesengajaan itu tidak dicantumkan, tetapi berdasarkan bunyi/redaksi rumusannya, dapat disimpulkan tidaklah mungkin tindak pidana itu dilakukan tanpa sengaja, misalnya pasal 110 (1). Dalam hal ini unsur kesengajaan itu telah terdapat secara terselubung dalam unsur tingkah lakunya. Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu adakalanya kesengajaan dan *culpa* dirumuskan secara bersamaan (ganda), maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana sengaja dan dapat berupa *culpa* sebagai alternatifnya.<sup>10</sup>

- d. **Berdasarkan macam perbuatannya**, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*). Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk

---

<sup>10</sup>*Ibid.* hal.127-128

berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi.<sup>11</sup>

- e. **Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya**, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya ada tindak pidana yang berlangsung lama yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut *voortdurende delicten*.<sup>12</sup>
- f. **Berdasarkan sumbernya**, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi Hukum Pidana Materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut.<sup>13</sup>
- g. **Dilihat dari sudut subjek hukumnya**, dapat dibedakan antara tindak pidana communia yaitu yang dapat dilakukan oleh siapa saja (*delicta communia*), dan tindak pidana propria yaitu dapat

---

<sup>11</sup>*Ibid.* hal.129

<sup>12</sup>*Ibid.* hal. 139

<sup>13</sup>*Ibid.* hal.131

dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu. Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja. Misalnya pegawai negeri pada kejahatan jabatan.<sup>14</sup>

- h. **Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan**, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*). Tindak pidana biasa disini dimaksudkan adalah yang jika dituntut pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sebaliknya, tindak pidana aduan disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan, yakni korban atau wakilnya.<sup>15</sup>
- i. **Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan**, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*). Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu pada bentuk yang diperberat dan atau yang diperingan, tidak mengulang kembali

---

<sup>14</sup>*Ibid.* hal.132

<sup>15</sup>*Ibid.* hal.132

unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena adanya peringanan dan pemberat, tindak pidana tersebut menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya.<sup>16</sup>

j. **Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi**, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

k. **Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan**, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*). Tindak pidana tunggal dipandang selesai dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sementara itu, tindak pidana berangkai dipandang selesai dan dapat dipidananya pembuat, disyaratkan dilakukan secara berulang.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>*Ibid.* hal.133-134

<sup>17</sup>*Ibid.* hal.136



## **B. Pidana dan Pemidanaan**

### **1. Pengertian Pemidanaan**

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggung jawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana.<sup>18</sup>

Menurut Van Hamel arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka.<sup>19</sup>

Menurut Sudarto, kata pemidanaan itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Penghukuman itu adalah sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Chairul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta, 2011) hal.129

<sup>19</sup> Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung, 1984) hal.47 & 49

<sup>20</sup> *Ibid.* hal.49

## 2. Teori Tujuan Pidanaan

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu :

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>21</sup>

Teori tujuan pidana dibagi dalam tiga golongan, yaitu :

- a. Teori Pembalasan

Menurut teori dari Kant, dasar pembenaran dari suatu pidana itu terdapat di dalam apa yang disebut *Kategorischen Imperativ*, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut, merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, hingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada sesuatu tujuan itu harus dikesampingkan.<sup>22</sup>

- b. Teori tujuan

Yakni teori-teori yang berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana itu semata-mata pada suatu tujuan tertentu,

---

<sup>21</sup>*Ibid.* hal 23

<sup>22</sup>*Ibid.* hal.25

berupa untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan dan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan.<sup>23</sup>

c. Teori gabungan

Menurut teori ini ialah hukuman mengandung unsur pembalasan dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggaran sehingga tata tertib masyarakat tidak terganggu serta memperbaiki si penjahat.

### **3. Jenis-Jenis Pidana**

Dalam KUHP, jenis-jenis pidana dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu :

a. Pidana pokok, terdiri dari :

1) Pidana mati

Hukuman mati ialah suatu hukuman yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat.

2) Pidana penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan diwajibkan menaati semua peraturan tata

---

<sup>23</sup>*Ibid.* hal.27

tertib yang berlaku di dalam penjara. Pidana penjara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup.<sup>24</sup>

### 3) Pidana kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan, sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP.

### 4) Pidana denda

Pidana denda pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang dewasa. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

### b. Pidana Tambahan

Penjatuhan dari pidana tambahan itu sifatnya adalah fakultatif, dalam arti bahwa hakim itu tidak selalu harus menjatuhkan pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang diadili. Pidana tambahan meliputi :

---

<sup>24</sup>*Ibid.* hal.69

#### 1) Pencabutan hak-hak tertentu

Sifatnya sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara seumur hidup. Adapun hak-hak yang dapat dicabut yaitu :

- (a) Hak untuk menduduki jabatan/jabatan tertentu;
- (b) Hak untuk bekerja pada Angkatan Bersenjata;
- (c) Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan-peraturan umum;
- (d) Hak untuk menjadi seorang penasehat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu;
- (e) Hak untuk melakukan pekerjaan tertentu.<sup>25</sup>

#### 2) Penyitaan benda-benda tertentu

Penyitaan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai penyitaan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu :

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;

---

<sup>25</sup>*Ibid.* hal.102-103

- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

### 3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim yaitu putusan yang disebarkan secara khusus akan disiarkan lagi sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya melalui siaran televisi, radio, surat kabar dan sebagainya.

## **C. Tindak Pidana Pencurian**

### **1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian**

#### a. Pencurian Biasa

Ketentuan umum mengenai perumusan pengertian pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP :

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 900,00.”

Unsur-unsur Pencurian dengan demikian adalah :

- 1) Harus ada perbuatan "mengambil" dari tempat dimana barang tersebut terletak.
- 2) Unsur barang yang "diambil". Harus barang yang berwujud. Selain itu barang tersebut harus dapat dipindahkan.
- 3) Unsur tujuan memiliki barang secara melawan hukum. Pelaku harus mengetahui bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain.

b. Pencurian dengan Pemberatan

Berbeda dengan Pasal 362 KUHP, maka pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP dinamakan pencurian dengan kualifikasi. Istilah yang digunakan R. Soesilo yaitu pencurian dengan pemberatan, sebab dari istilah tersebut dapat dilihat bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.

c. Pencurian ringan

Pencurian ringan ini adalah pencurian barang-barang yang nilainya sangat rendah, yaitu semula hanya untuk barang yang tidak bernilai lebih dari Rp. 25,00. Pada tahun 1960 dengan Undang-Undang No.16/Prp/1960 Pemerintah menaikkan nilai Rp. 25,00 menjadi Rp. 250,00, dengan ancaman pidana hanya minimum 3 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp. 60,00 dinaikkan 15 kali.

d. Pencurian dengan kekerasan

Diatur dalam Pasal 365 KUHP, menyebutkan diantaranya :

- 1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun

## **2. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**

a.) Dasar Hukum

Tindak pidana pencurian berat atau berkualifikasi diatur dalam Pasal 363 ayat (1) dan (2). Secara lengkap, Pasal 363 ayat (1) dan (2) berbunyi :

Ayat (1) :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan, tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat (2) :

Jika Pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

b.) Unsur Tindak Pidana Pencurian Berat atau Berkualifikasi

Apabila diuraikan, maka unsur-unsur dalam Pasal 363 adalah :

- 1) Unsur barang siapa;
- 2) Unsur mengambil barang;
- 3) Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
- 4) Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5) Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 6) Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih.

Ad. 1. Barangsiapa

Barangsiapa disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

#### Ad. 2. Mengambil barang

Mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dengan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.

#### Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain

Unsur ini bertujuan untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil. Pengertian orang lain adalah tidak termasuk suami istri khusus untuk menerapkan ketentuan pasal 362 KUHP, sedang tindak pidana lain seperti ketentuan pasal 338 KUHP, semua orang adalah orang lain, termasuk suami atau istri. Jadi syarat untuk dipenuhi unsur barang dalam Pasal 362 KUHP haruslah “barang tersebut milik orang lain seluruhnya atau sebagian”, ini berarti bahwa atas barang itu sekurang-kurangnya oleh dua orang atau lebih. Selanjutnya dalam penerapan pasal 362 KUHP khusus menyangkut unsur “barang milik orang lain” bukan dalam bentuk hak gadai, hak sewa, hak menikmati dan sebagainya adalah hak dalam pengertian hak kebendaan yang dapat dilihat secara nyata/riil.

#### Ad. 4. Unsur melawan hukum

Pengertian melawan hukum sering juga digunakan dalam undang-undang dengan istilah bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak atau melawan hak. Dalam undang-undang sesuai penjelasan resmi dalam KUHP, melawan hukum diartikan bahwa setiap kali digunakan, orang

melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu undang-undang atau ketentuan yang berlaku.

Pendapat yang berpendirian bahwa perbuatan tersebut melawan hukum yakni :

1. Pendapat yang berpendirian formil :

Bahwa menurut pengertian melawan hukum adalah apabila sesuatu perbuatan telah mencocoki rumusan undang-undang atau larangan undang-undang, yang menggariskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, dalam hal ini bersifat melawan hukum.

2. Pendapat yang berpendirian ajaran materiil :

Bahwa perbuatan yang mencocoki rumusan undang-undang belum tentu bersifat melawan hukum sebab hukum bukan saja hanya terdiri dari undang-undang saja, tetapi diluar daripada undang-undang tersebut masih ada, meskipun perbuatan itu melawan hukum secara formil diatur dalam undang-undang, tetapi secara materiil perbuatan itu tidaklah bertentangan dengan kehendak masyarakat, maka perbuatan tersebut tidaklah melawan hukum.

Sehubungan dengan unsur 3 dan 4 yakni dengan maksud hendak memiliki barang dengan melawan hukum, bahwa sebetulnya ada kontradiksi antara “memiliki barang” dan “melanggar hukum”. Memiliki barang berarti menjadikan dirinya sebagai pemilik dan untuk menjadi

pemilik menurut hukum, maka sebenarnya adalah tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum, oleh karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang.<sup>26</sup>

Ad. 5. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Pengertian malam adalah sesuai pengertiannya yang diatur dalam Pasal 98 KUHP yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian rumah dalam pasal 363 KUHP adalah jauh lebih luas dari pengertian sehari-hari yakni semua tempat dimana manusia memusatkan kediamannya, misalnya toko/tempat jualan, tetapi bukan tempat kediaman, maka bukanlah pengertian rumah, kecuali ia memusatkan kehidupannya disitu.

Ad. 6. Yang dilakukan Dua Orang atau Lebih

Suatu perbuatan pidana dimana dilakukan minimal oleh dua orang atau lebih dimana masing-masing memiliki perannya.

---

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (bandung,2003) hal.17

#### **D. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

Dalam menjatuhkan putusan, Hakim melakukan beberapa pertimbangan yakni sebagai berikut :

##### **1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Dalam menjatuhkan putusan haruslah terpenuhi unsur delik yang menjadi dasar bahwa seseorang dianggap bersalah atau telah melakukan tindak pidana. Selain itu adapula pembuktian agar dapat mengungkap kebenaran.

Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan membuktikan mengandung maksud usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung, 2003), hal.11

Adapun alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana dapat dilihat pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Menurut Sri Rahayu Sundari banyak hal-hal yang mempengaruhi pembedaan yang terdapat di dalam undang-undang yaitu :

a. Hal-hal yang memberatkan pembedaan :

1) Kedudukan sebagai pejabat (Pasal 52 KUHP)

Pejabat ialah mereka yang diangkat oleh penguasa umum yang berwenang dalam jabatan umum, untuk melaksanakan sebagian tugas negara atau alat-alat perlengkapan. Menurut dalam ketentuan Pasal 52 KUHP apabila seorang pejabat karena melaksanakan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan padanya karena jabatannya pidananya ditambah 1/3-nya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, (Yogyakarta, 1988), hal.186-187

## 2) Pengulangan tindak pidana (*Recidive*)

Pengulangan tindak pidana adalah merupakan alasan pemberatan pidana, tetapi tidak untuk semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana yang disebutkan pada pasal tertentu saja dari KUHP, yang menurut beberapa macam kejahatan yang apabila dalam waktu tertentu dilakukan pengulangan lagi, dapat dikenakan pidana yang diperberat sampai 1/3-nya dari pidana yang diancamkan atas masing-masing tindak pidana itu.<sup>29</sup>

### b. Hal-hal yang meringankan pembedaan

- 1) Menurut KUHP : belum berumur 16 tahun
- 2) Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1997 : anak yang umurnya telah mencapai 8 tahun tetapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin.
- 3) Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan.<sup>30</sup>  
Dari segi tata bahasa istilah percobaan adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu dalam keadaan diuji.<sup>31</sup>

## 2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Pasal 55 Ayat (1)

---

<sup>29</sup>*Ibid. hal.188-189*

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Bagian 2 Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta, 2005) hal.97

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Bagian 3 Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta, 2002) hal. 1

Rancangan KUHP Nasional Tahun 2012, menentukan bahwa dalam pembedaan, wajib mempertimbangkan:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin membuat tindak pidana;
- d. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- j. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan-keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan tentang sosiologis dan psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta, dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem tulisan ilmiah yang proporsional.

Lokasi penelitian penulis adalah pada kantor Pengadilan Negeri Maros, dipilihnya lokasi penelitian tersebut atas dasar pertimbangan bahwa dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut terdapat kasus pencurian, sesuai dengan judul yang penulis telah ajukan.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi guna melengkapi data.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku ilmiah, internet dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan dua metode penelitian, yaitu :

1. Study kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan bahan hukum dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Wawancara (*Interview*), yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait yang menangani masalah yang berkaitan dengan tindak pidana yang diteliti, antara lain Hakim di Pengadilan Negeri Maros yang memutus perkara tersebut.

### **D. Analisis Data**

Data yang diperoleh serta yang telah dikumpulkan melalui penelitian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif, yakni data yang telah dikumpulkan diinventarisir dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori, asas-asas hukum pidana dan mengacu pada perundang-undangan. Dengan melakukan pendekatan yuridis dengan teknik analisis deskriptif maka permasalahan dalam skripsi ini dapat ditarik suatu kesimpulan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Perkara No.94/Pid. B/2015/PN Mrs.**

Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian kepada korban. Kepentingan hukum yang dilindungi dalam pemidanaan pencurian ialah hak milik orang atas barang. Delik pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Namun pada kasus kali ini akan membahas Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan pada Pasal 363 KUHP. Semua bagian inti delik yang tercantum di dalam Pasal 362 KUHP berlaku juga untuk Pasal 363 KUHP, ditambah dengan satu bagian inti (*bestanddeel*) lagi yang menjadi dasar pemberatan pidana. Adapun isi dari Pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut ;

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
  1. Pencurian ternak;
  2. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
  3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;
  4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- (2) Jika pencurian tersebut dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal dalam nomor 4 dan 5, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Penulis akan menguraikan ringkasan dari posisi kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 94/Pid.B/2015/PN.Mrs, yaitu sebagai berikut :

### **1. Posisi Kasus**

- a. Berawal pada suatu malam, terdakwa Abd. Wahid sedang berboncengan dengan Sulkifli (DPO) melewati sebuah rumah dan melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir.
- b. Terdakwa Abd. Wahid lalu turun kemudian masuk ke dalam pagar dan mengambil sepeda motor tersebut.
- c. Sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci leher sehingga terdakwa Abd. Wahid memutar stirnya sampai kunci leher sepeda motor tersebut terlepas.
- d. Kemudian terdakwa Abd. Wahid mendorong sepeda motor tersebut keluar pagar menuju jalan raya namun pada saat itu Habibi (saksi), Irwan (saksi), Imam(saksi) melihat terdakwa.
- e. Kemudian para saksi berteriak sambil mengejar terdakwa Abd. Wahid sehingga terdakwa meninggalkan sepeda

motor tersebut di tengah jalan dan terdakwa lari meninggalkan TKP.

## 2. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa Abd. Wahid yang dibacakan pada persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang pokoknya mengatakan sebagai berikut :

### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa ABD WAHID BIN ABD WAHAB bersama-sama dengan SULKIFLI ALIAS SUL (DPO) pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 sekitar pukul 01.00 Wita (malam hari) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015 bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Alliritengngae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa ABD WAHID BIN ABD WAHAB berboncengan dengan SULKIFLI ALIAS SUL (DPO) melewati sebuah rumah dan melihat ada sepeda motor Honda Scoopy warna putih DD 2504 HI yang sedang terparkir, Terdakwa ABD WAHID BIN ABD WAHAB lalu turun kemudian masuk ke dalam pagar dan mengambil sepeda motor tersebut dalam kondisi terkunci leher sehingga Terdakwa ABD WAHID BIN ABD WAHAB memutar stirnya sampai kunci leher sepeda motor tersebut

- terlepas kemudian Terdakwa ABD WAHID BIN ABD WAHAB mendorong sepeda motor Honda Scoopy DD 2504 HI keluar pagar menuju jalan raya namun pada saat itu saksi HABIBI BIN ANDI MANGUMPARENG, saksi IRWAN ALIAS IWAN BIN MUHAMAD YUSUF dan saksi IMAM BIN MUHAMMAD YUSUF melihat Terdakwa kemudian para saksi berteriak sambil mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy DD 2504 HI tersebut di tengah jalan dan Terdakwa lari meninggalkan TKP.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ABD WAHID BIN ABD WAHAB tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.

### **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa ABD WAHID BIN ABD WAHAB pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primair diatas, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa ABD WAHID BIN ABD WAHAB berboncengan dengan SULKIFLI ALIAS SUL (DPO) melewati rumah dan melihat ada sepeda motor Honda Scoopy warna putih DD 2504 HI yang sedang terparkir, Terdakwa ABD WAHID BIN ABD WAHAB lalu turun kemudian masuk ke dalam pagar dan mengambil sepeda motor Honda Scoopy DD 2504 HI namun sepeda motor tersebut dalam kondisi terkunci leher sehingga Terdakwa ABD WAHID BIN ABD WAHAB memutar stirnya sampai kunci leher sepeda motor tersebut terlepas kemudian Terdakwa ABD WAHID BIN ABD WAHAB mendorong sepeda motor Honda Scoopy DD 2504 HI keluar pagar menuju jalan raya namun pada saat itu saksi HABIBI BIN ANDI MANGUMPARENG, saksi IRWAN ALIAS IWAN BIN MUHAMAD YUSUF dan saksi IMAM BIN MUHAMMAD

- YUSUF melihat Terdakwa kemudian para saksi berteriak sambil mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy DD 2504 HI tersebut di tengah jalan dan Terdakwa lari meninggalkan TKP ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ABD WAHID BIN ABD WAHAB tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

### 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa adalah salah satu pihak dalam perkara pidana, Jaksa adalah penuntut umum yang berhadapan dengan terdakwa. Tugasnya adalah membuktikan unsur-unsur delik pidana yang didakwakannya atas diri terdakwa.<sup>32</sup>

Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Registrasi Perkara : PDM-51/MRS/Epp.2/07/2015, tertanggal 10 Agustus 2015, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ABD WAHID BIN ABD WAHAB** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk

---

<sup>32</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta, 2002) hal. 313

sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABD WAHID BIN ABD WAHAB** pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna putih  
No.Pol DD 2504 HI No.Rangka MH JF6114AKO68850,  
No.Mesin JF61E-108718 bersama dengan STNK aslinya  
dikembalikan kepada saksi HABIBI Alias JORDY BIN ANDI  
AMANGUMPARANG ;
  - 2) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

#### **4. Amar Putusan**

##### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa Abd. Wahid Bin Abd. Wahab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan ;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol DD 2504 HI No. Rangka MH JF6114AKO68850, No. Mesin JF61E108718 bersama dengan STNK aslinya dikembalikan kepada Habibi Alias Jordy Bin Andi Mangumpareng ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

## **5. Analisis Penulis**

Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan ketentuan, hal ini didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan ditambah dengan keterangan terdakwa yang membenarkan

keterangan saksi atas perbuatan yang dilakukannya yang sudah bersesuaian dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 363 KUHP dalam dakwaannya, yang semua bagian inti delik tercantum di dalam Pasal 362 KUHP, ditambah dengan satu bagian inti (*bestanddeel*) lagi yang menjadi dasar pemberatan pidana.

Unsur-unsur dalam Pasal 363 adalah :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan dua orang atau lebih.

Dalam kasus ini semua unsur yang termasuk di dalam Pasal 363 telah terpenuhi dan dilakukan oleh terdakwa Abd Wahid Bin Abd Wahab, bersama dengan Sulkifli yang saat ini masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **1. Keterangan Saksi Habibi Bin Andi Mangumpareng:**

Pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2015 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di halaman rumah teman saksi yang bernama Irwan di Jalan Veteran No.17, Kel. Allitengngae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Walau tidak menyaksikan secara langsung, saksi Habibi mendengar teriakan saksi Irwan lalu melihat terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman. Tindakan saksi pada waktu itu ialah langsung mengejar terdakwa tetapi tidak sempat tertangkap, lalu saksi mengejar lagi teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi sempat bertemu dengan teman terdakwa dan mengaku jika memang terdakwa bersama dengan temannya yang mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya teman terdakwa dibawa ke Kantor Polisi. Saksi Habibi membenarkan sepeda motor tersebut adalah Honda Scoopy warna putih DD 2504 HI, yang terparkir di halaman rumah saksi Irwan yang ada pagarnya tetapi masih terbuka sebelah karena saksi Irwan masih sedang bermain domino, motor tersebut dalam keadaan terkunci leher. Saksi Habibi tidak mengetahui kerugian yang dialami korban karena sepeda motor tersebut belum dibawa ke bengkel, walau jelas telah mengalami kerusakan karena telah diambil paksa.

## **2. Keterangan Saksi Irwan alias Iwan Bin Muhammad Yusuf :**

Pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2015 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di halaman rumah saksi Jalan Veteran No.17, Kel. Allitengngae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, saksi melihat langsung pada saat terdakwa mengambil dan mendorong sepeda motor Honda Scoopy warna putih DD 2504 HI milik saksi Habibi Bin Andi Mangumpareng, keluar dari halaman rumah saksi. Dimana motor tersebut dalam keadaan terkunci leher. Halaman rumah tersebut ada pagarnya tetapi masih terbuka sebelah karena pada malam itu saksi bersama saksi Habibi masih bermain domino. Sepeda motor tersebut telah di dorong keluar dari pekarangan rumah saksi oleh terdakwa sekitar sepuluh meter. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan temannya yang sementara sedang menunggu di atas sepeda motornya di luar pagar. Sebelum kejadian tersebut, saksi sempat melihat terdakwa bersama dengan temannya berboncengan memakai sepeda motor sebanyak tiga kali bolak-balik di depan rumah saksi dan pada malam itu saksi telah curiga karena setiap terdakwa lewat pasti melihat ke dalam halaman tempat sepeda motor tersebut diparkir.

### **3. Keterangan Terdakwa Abd. Wahid Bin Abd. Wahab :**

Pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2015 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di halaman rumah saksi Irwan di Jalan Veteran No.17, Kel. Allitengngae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Habibi Bin Andi Mangumpareng, berupa Honda Scoopy warna putih DD 2504 HI. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama temannya yang bernama Zul, dimana teman terdakwa menunggu diatas motornya diluar pagar sedangkan terdakwa yang masuk di dalam halaman atau di dalam pagar untuk mengambil sepeda motor tersebut. Sebelum mengambil sepeda motor tersebut terdakwa bersama temannya telah melewati depan rumah saksi Irwan dan melihat ada sepeda motor yang terparkir, lalu terdakwa menunjuk sepeda motor tersebut untuk diambil. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk lewat pintu pagar yang masih terbuka sebelah dan langsung mendekati sepeda motor tersebut kemudian memutar secara cepat dan keras hingga kunci lehernya rusak kemudian terdakwa mendorong keluar pinggir jalan. Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut karena terdakwa dikejar oleh saksi Irwan dan saksi Habibi sehingga sepeda motor tersebut terdakwa tinggalkan lalu melarikan diri.

#### **4. Barang Bukti :**

1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih DD  
2504 HI, No. Rangka : MH JF6114AKO68850, No. Mesin :  
JF61E-108718

Delik ini dikatakan selesai dan bukan percobaan pencurian dikarenakan dalam Unsur Mengambil Barang telah dijelaskan bahwa mengambil barang adalah menggerakkan tangan dengan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Dalam kasus diatas sepeda motor tersebut memang tidak sampai terdakwa bawa pergi dan dijual kembali, namun sepeda motor tersebut telah berpindah tempat sejauh sepuluh meter. Maka dikatakanlah bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain. Serta terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut, ingin mengambil alih barang yang merupakan hak milik orang lain. Selain itu delik pencurian termasuk ke dalam delik formil, yaitu suatu perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Delik formil mensyaratkan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebutkan akibatnya, atau dengan kata lain yang dilarang adalah perbuatannya.

Menurut penulis terdakwa terbukti melakukan tindakan mengambil barang milik orang lain, yang berada di dalam pekarangan sebuah rumah. Sebelum mengambil terdakwa terlebih dahulu membuka pintu pekarangan

rumah korban lalu merusak kunci leher motor yang dicuri tersebut. Terdakwa melakukan tindakan tersebut pada waktu malam hari, pada saat yang tidak dikehendaki oleh yang berhak. Terdakwa melakukan tindakan tersebut bersama dengan Sulkifli (DPO), dengan kata lain terdakwa melakukan tindakan tersebut sebanyak dua orang.

Dengan demikian, maka penulis setuju dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyimpulkan bahwa terdakwa secara hukum telah melakukan perbuatan yang melanggar pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.

#### **B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana pada Perkara No.94/Pid.B/2015/PN.Mrs**

Setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat perlimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Proses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajarannyalah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili. Keputusan hakim harus mencerminkan keadilan. Keadilan menurut hakim sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita

memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

### **1. Pertimbangan Hukum Hakim**

Putusan pidana hakim hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana termaktub dalam dakwaan Penuntut Umum.<sup>33</sup>

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan Nomor. 94/Pid.B/2015/PN.Mrs, berdasarkan beberapa pertimbangan. Terlebih dahulu hakim membaca dakwaan sesuai yang didakwakan penuntut umum. Setelah hakim membaca isi surat dakwaan tersebut, hakim lalu memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis. Adanya alat bukti yang didapat yaitu :

1. Keterangan saksi-saksi, yaitu Habibi Bin Andi Mangumpareng dan Irwan Alias Iwan Bin Muhammad Yusuf.
2. Keterangan terdakwa Abd. Wahid Bin Abd. Wahab
3. Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih DD 2504 HI

Pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan pemidanaan suatu tindak pidana sangat bergantung pada hakim yang merumuskan. Adapun

---

<sup>33</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta, 2008) hal. 88



dasar pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan No.94/Pid.B/2015/PNMrs adalah sebagai berikut :

- 1) Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut :

Primair, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP. Subsidair, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

- 2) Oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak ;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan

merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci, perintah palsu.

**Ad. 1 Unsur Barangsiapa:**

- 1) Unsur Barangsiapa menurut ketentuan perundang-undangan adalah subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;
- 2) Dimuka persidangan dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama ABD WAHID BIN ABD WAHAB dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang diajukan kepersidangan tidak terjadi kesalahan terhadap orang (*error in person*);
- 3) Selama proses persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, maka unsur barangsiapa dinyatakan telah terpenuhi.

**Ad. 2 Unsur Mengambil sesuatu barang:**

- 1) Mengambil sesuatu barang yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum dibawah kekuasaan nyata menjadi dibawah kekuasaan terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan barang/benda yaitu barang

berwujud yang dapat ditangkap oleh panca indera atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik ;

- 2) Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan maka telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2015 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di halaman rumah saksi Irwan di Jl.Veteran No.17, Kelurahan Allitengngae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Sulkifli telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna putih DD 2504 HI yang dalam keadaan terparkir di halaman rumah atau di dalam pagar, terdakwa mendorong motor tersebut sekitar 10 meter di depan pagar. Namun dikejar oleh saksi Irwan dan saksi Habibi sehingga terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan melarikan diri ;
- 3) Berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersama temannya mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dikuasai atau dimiliki dimana motor tersebut semula belum berada dalam kekuasaan terdakwa atau telah berpindah tempat dari tempatnya semula, maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi.

**Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain:**

- 1) Seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain dan bukan milik terdakwa baik sebahagian maupun seluruhnya;
- 2) Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih DD 2504 HI yang diambil terdakwa bersama temannya Sul kifli bukanlah milik terdakwa maupun temannya, melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni Saksi Habibi Bin Andi Mangumpareng, maka unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad. 4 Unsur dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum :**

- 1) Dimiliki dengan melawan hukum yaitu dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hak atau hukum ;
- 2) Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa barang berupa yang diambil terdakwa bersama temannya adalah milik orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih DD 2504 HI dimana terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan sengaja dan tanpa ijin dari pemiliknya yang mana terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum. Maka Majelis

Hakim berpendapat unsur dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad. 5 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya :**

- 1) Malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pukul 01.00 Wita (tengah malam).
- 2) Berdasarkan uraian tersebut di atas unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad. 6 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :**

- 1) Maksud dari dilakukan dua orang atau lebih adalah bahwa suatu perbuatan dilakukan lebih dari satu orang pelakunya.
- 2) Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut dilakukan bersama teman terdakwa yaitu Zulkifli, dimana terdakwa berboncengan dan ketika tiba di tempat kejadian terdakwa yang mengambil sepeda motor sedangkan teman terdakwa menunggu diluar pagar.
- 3) Berdasarkan uraian diatas unsur dilakukan dua orang atau lebih telah terpenuhi.

**Ad. 7 Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu :**

- 1) Unsur perbuatan ini bersifat alternatif, artinya secara yuridis jika salah satu sub unsurnya telah terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terpenuhi sehingga unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi.
- 2) Berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih di halaman rumah korban, dalam keadaan terkunci leher kemudian diputar paksa memutar secara cepat dan keras hingga kunci leher motor tersebut rusak.
- 3) Berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Keadaan-keadaan yang perlu dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa adalah sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
2. Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

## **2. Putusan Hakim**

Berdasarkan unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP. Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan.

## **3. Analisis Penulis**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah sertamenciptakan hukum sendiri yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

Pengambilan putusan oleh hakim dilakukan setelah seluruh tahap pembuktian selesai dan para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing. Sebelum memutus perkara tersebut, majelis hakim akan melakukan musyawarah majelis untuk mendiskusikan dan menyimpulkan perkara tersebut.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermetika Putusan Hakim*, (Yogyakarta, 2014) hal.15

Dalam kasus yang penulis bahas kali ini, letak lokasi penulis melakukan penelitian adalah di Kabupaten Maros, lebih tepatnya di Pengadilan Negeri Maros. Penulis melakukan proses wawancara dengan salah satu hakim yakni Bapak Baryanto, SH, LLM. Penulis diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai kasus yang penulis angkat sebagai bahan penelitian skripsi. Sehubungan dengan rumusan masalah kedua yang diangkat oleh penulis adalah mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana no. 94/Pid.B/2015/PN Mrs.

Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, sedangkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Adapula menurut KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Penulis merasa tidak sependapat dengan penjatuhan putusan pidana penjara hanya selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dikarenakan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan atau yang meringankan yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan lagi. Dimana keadaan-keadaan yang memberatkan lebih banyak daripada keadaan yang meringankan. Ditambah lagi terdakwa telah pernah dihukum sebelumnya atau dengan kata lain mengalami *Recidive*, yakni pengulangan tindak pidana. Namun Hakim pada Pengadilan Negeri Maros hanya menjawab bahwa dari semua hal yang dapat dipertimbangkan oleh hakim, pada akhirnya akan dikuatkan dengan logika hukum atau keyakinan hakim. Dimana keyakinan hakim tersebut dapat diterima akal sehat



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penerapan hukum materil oleh Jaksa Penuntut Umum menurut penulis sudah tepat. Karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta keterangan saksi maupun keterangan terdakwa, menurut penulis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai delik selesai, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.
2. Pertimbangan hukum hakim menurut penulis dalam perkara Nomor94/Pid.B/2015/PN.Mrs yang menjatuhkan terdakwa Abd. Wahid dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah sesuai. Karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan maupun keterangan saksi dan keterangan terdakwa telah memenuhi unsur-unsurtindak pidana pencurian dengan pemberatan, walau dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdapat keraguan-raguan sehingga Penuntut Umum membuat dakwaan subsidaritas dengan Pasal 363 KUHP Ayat (1) Ke-3, ke-4, ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yaitu Pasal Percobaan. Hanya saja Hakim kurang

mempertimbangkan andil korban dalam tindak pidana ini yang telah pernah dihukum sebelumnya. Sekaligus kurang mempertimbangkan faktor yang memberatkan, yang lebih banyak dibanding dengan faktor yang meringankan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sebaiknya kinerja dari aparat penegak hukum baik dari pihak kepolisian, pihak kejaksaan maupun dari pihak hakim lebih ditingkatkan sehingga dapat memberikan cerminan kepada masyarakat bahwa kinerja aparat hukum lebih baik dari yang sebelumnya sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum.
2. Diharapkan para hakim dalam menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan dengan seksama faktor-faktor yang meringankan maupun yang memberatkan dalam dakwaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Ali, 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Prenada Media group, Cetakan ke-4
- , 2002. *Menguak Tabir Hukum: suatu kajian filosofis dan sosiologis*, Jakarta: Toko Gunung Agung, Cetakan ke-2
- Andi Hamzah, 2009. *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika
- Asnawi, M. Natsir. 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-6
- , 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-2
- , 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-1
- Huda, Chairul. 2011. *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Media Group, Cetakan ke-4
- Marpaung, Leden. 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

P.A.F. Lamintang, 1994, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: CV. ARMICO, Cetakan ke-4

Prakoso, Djoko. 1986. *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty

Sasangka, Hary dan Lily Rosyita. 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.

Suharto dan Jonaedi Efendi, 2013, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Waluyo, Bambang. 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

#### **INTERNET**

<http://legal-community.blogspot.co.id/2011/08/tindak-pidana-pencurian-dalam-kuhp.html?m=1>, diakses pada tanggal 22 oktober 2015 pukul 21.17 WITA